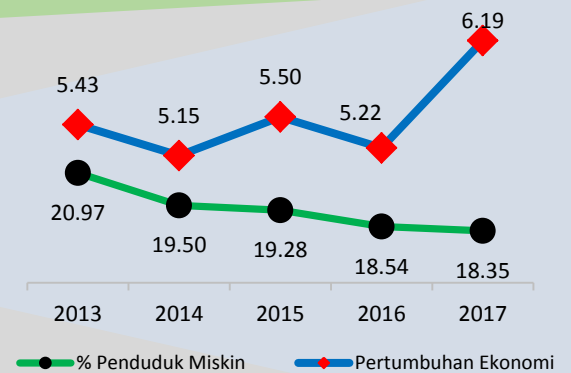


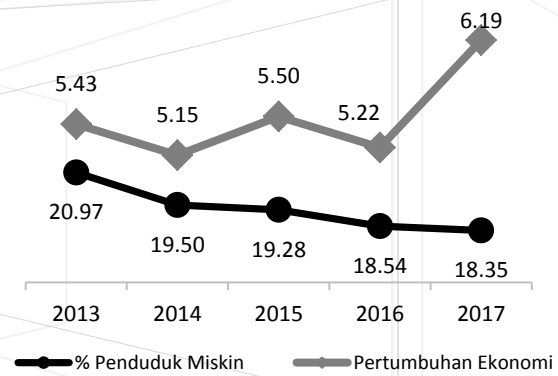
# ANALISIS KEMISKINAN *dan* PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN REMBANG 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN REMBANG**



# ANALISIS KEMISKINAN *dan* PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN REMBANG 2017



# **ANALISIS KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN REMBANG 2017**

ISBN :  
Nomor Publikasi : 33172.1828  
Katalog : 3205008.3317

Ukuran Buku : A4 (21 cm x 29,7 cm))  
Jumlah Halaman : xv + 46 halaman

## **Naskah :**

Seksi Statistik Sosial - Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

## **Penyunting :**

Seksi Statistik Sosial - Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

## **Gambar Kulit :**

Seksi Statistik Sosial - Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

## **Diterbitkan oleh :**

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

## **Dicetak oleh :**

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

**Tim Penyusun**

**ANALISIS KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
KABUPATEN REMBANG 2017**

**Pengarah:**

Henri Wagiyanto, S.Pt, MEc.Dev, MA

**Penanggung Jawab:**

Henri Wagiyanto, S.Pt, MEc.Dev, MA

**Editor:**

Khaerul Anwar, S.ST

**Penulis:**

Faisal Luthfi Arief, S.ST

**Pengolah Data:**

Faisal Luthfi Arief, S.ST

**Pengolah Data:**

Faisal Luthfi Arief, S.ST

**Desain/Layout:**

Faisal Luthfi Arief, S.ST

Sukaryo



## ABSTRAK

Percepatan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia, termasuk di Kabupaten Rembang. Sebab ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial, termasuk kemiskinan dan pengangguran.

Data yang digunakan dalam publikasi “Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang 2017” berasal dari Survei Sosial Ekonomi (Susenas) dan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) periode tahun 2013-2017 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang. Publikasi ini hanya membahas pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang selama tahun 2013-2017 cenderung mengalami percepatan dari 5,43 persen menjadi 6,19 persen, meskipun sempat mengalami perlambatan pada tahun 2014 dan 2016. Selama itu angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan dari 20,97 persen menjadi 18,35 persen.

Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang dapat mengurangi angka kemiskinan, meskipun kemiskinan tetap menurun ketika pertumbuhan ekonomi melambat. Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan, tetapi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) justru mengalami kenaikan.

Percepatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan merupakan kewajiban pemerintah dalam upaya menuju keberhasilan pembangunan. Tetapi masyarakat secara keseluruhan, termasuk penduduk miskin, juga harus diikutsertakan dan menyadari bahwa mereka juga salah satu subjek dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.





## KATA PENGANTAR

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, tak terkecuali Indonesia. Persoalan yang sama juga menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat Kabupaten Rembang. Sehubungan hal di atas, maka Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang menyajikan publikasi “**Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang 2017**”.

Publikasi ini berisi tentang data dan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan distribusi pendapatan dan indikator lain yang terkait dengan ketiga masalah tersebut di Kabupaten Rembang. Data yang disajikan merupakan hasil penghitungan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan PDRB Tahun 2017. Agar dapat diamati perkembangannya, maka ditampilkan pula data series dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan terbitnya publikasi ini diharapkan sebagian kebutuhan data, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan dapat terpenuhi. Semoga publikasi ini bermanfaat, terutama bagi pengambil kebijakan dan semua pihak yang berkepentingan. Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini diterbitkan diucapkan terimakasih.

Rembang, Desember 2018

BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN REMBANG

**KEPALA,**



**HENRI WAGIYANTO, S.Pt, MEc.Dev, MA**



## DAFTAR ISI

Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran .....	xv
Infografis .....	xvii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan Penulisan .....	1
1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data .....	2
1.4. Sistematika Penulisan .....	2
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>3</b>
2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	3
2.2. Definisi Kemiskinan .....	4
2.2.1. Jenis-jenis Kemiskinan .....	4
2.2.2. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran .....	7
2.3. Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan .....	8
<b>BAB III. METODOLOGI .....</b>	<b>11</b>
3.1. Metode Penghitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	11
3.2. Metode Penghitungan Kemiskinan .....	12
<b>BAB IV. PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN REMBANG.....</b>	<b>19</b>
4.1. Struktur Perekonomian Kabupaten Rembang .....	19
4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang .....	21
4.3. PDRB Per Kapita Kabupaten Rembang .....	22
<b>BAB V. KEMISKINAN DI KABUPATEN REMBANG .....</b>	<b>25</b>
5.1. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang .....	25
5.2. Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang.....	27
5.3. Ukuran Indeks Kemiskinan di Kabupaten Rembang .....	29

<b>BAB VI. KETERKAITAN ANTARA KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB VII. PENUTUP .....</b>	<b>33</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>37</b>

<https://rembangkab.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi PDRB Seri 2010 Adh Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang, 2013-2017 (persen) .....	20
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, 2013-2017 (persen) .....	21
Tabel 4.3	PDRB Per Kapita adh Berlaku dan Konstan Kabupaten Rembang, 2013-2017 .....	22

<https://rembangkab.bps.go.id>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rembang, 2013-2017 .....	25
Gambar 5.2	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2017 .....	26
Gambar 5.3	Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang, 2013-2017 (Rp) .....	27
Gambar 5.4	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2017 .....	28
Gambar 5.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Rembang, 2013-2017.....	30
Gambar 6.1	Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, 2013-2017 .....	31
Gambar 6.2	Persentase Penduduk Miskin, Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Persentase Penurunan Kemiskinan Per 1% LPE di Kabupaten Rembang, 2013-2017.....	32



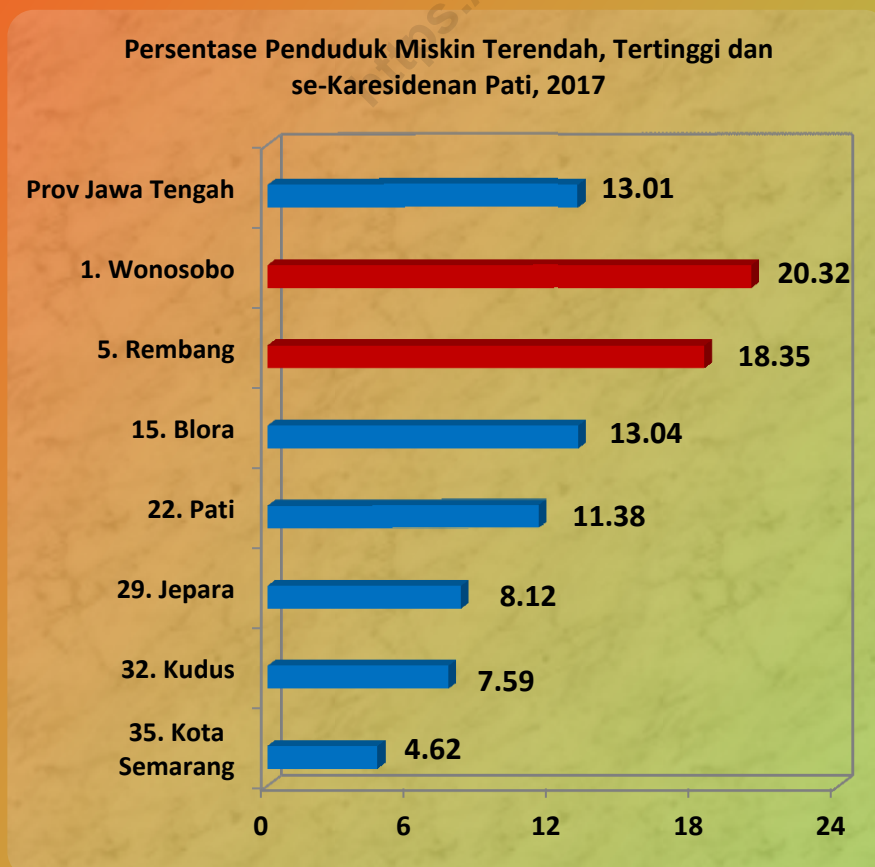
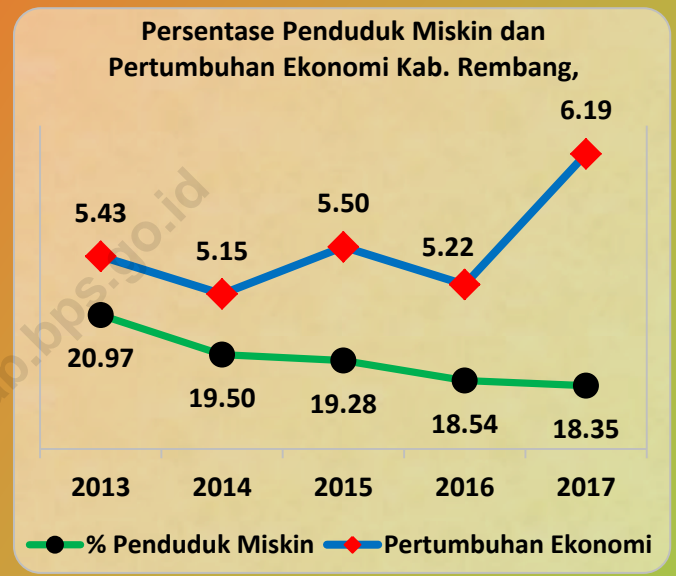
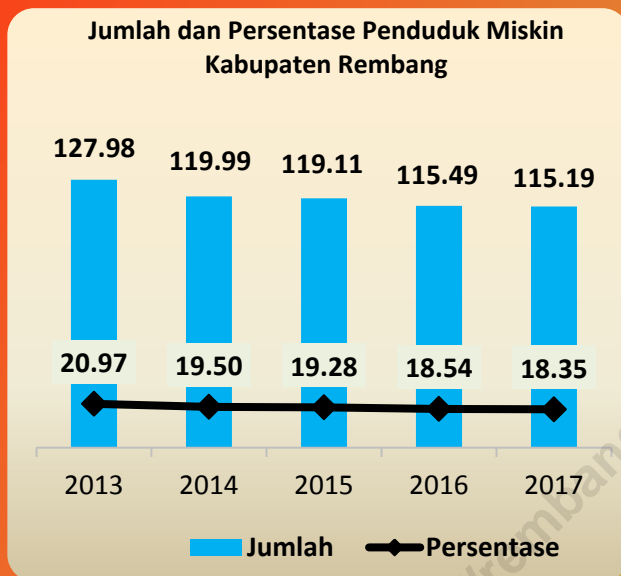


## DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.	PDRB Seri 2010 Adh Berlaku dan Konstan Menurut Lapangan Usaha serta Perkembangannya di Kabupaten Rembang, 2013-2017 .....	39
Tabel 2.	Distribusi PDRB Seri 2010 Adh Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang, 2013-2017 (persen) .....	40
Tabel 3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, 2013-2017 (persen) .....	41
Tabel 4.	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang, 2013-2017.....	42
Tabel 5.	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2014 .....	43
Tabel 6.	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2015 .....	44
Tabel 7.	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2016 .....	45
Tabel 8.	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2017 .....	46



## Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang 2017





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan adalah persoalan sosial ekonomi mendasar yang menjadi fokus dan perhatian utama Pemerintah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Rembang. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan Pemerintah, namun pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di sebuah negara tidak terlepas dari strategi pembangunan yang diterapkan. Pembangunan ekonomi dengan strategi pertumbuhan banyak diterapkan oleh negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Strategi pembangunan dilaksanakan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan. Akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum diikuti penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan dan ada indikasi melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa strategi pembangunan yang diambil kurang tepat sasaran, sehingga hasilnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Oleh karena itu upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan upaya pemerataan dalam distribusi pendapatan perlu terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan supaya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

### **1.2. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini antara lain untuk :

- a. Mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang
- b. Mengetahui perkembangan kemiskinan Kabupaten Rembang
- c. Melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

### 1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk kemiskinan dan distribusi pendapatan merupakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan data PDRB tahun 2017 yang dilaksanakan di Kabupaten Rembang.

Dalam penulisan ini disajikan juga series data, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan yang terjadi di Kabupaten Rembang. Dengan tersedianya series data tersebut, perencana dan pengambil kebijakan program pembangunan di Kabupaten Rembang dapat menyusun program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan lebih baik.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Tulisan ini disusun dalam 8 (delapan) bab, yaitu :

- Bab I. Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan sumber data serta sistematika penulisan.
- Bab II. Kajian Pustaka**, merupakan kajian literatur/pustaka yang menjelaskan konsep PDRB, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan serta keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.
- Bab III. Metodologi**, menjelaskan tentang metode penghitungan pertumbuhan ekonomi, indikator kemiskinan yang mencakup tentang persentase penduduk miskin, ukuran kedalaman kemiskinan dan ukuran keparahan kemiskinan serta konsep dari beberapa istilah.
- Bab IV. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang**, membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita Kabupaten Rembang.
- Bab V. Kemiskinan di Kabupaten Rembang**, membahas tentang perkembangan kemiskinan, garis kemiskinan dan ukuran indeks kemiskinan di Kabupaten Rembang.
- Bab VI. Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan**, membahas keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.
- Bab VII. Penutup**, berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan penutup.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)**

**PDRB adhb (atas dasar harga berlaku)** adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (*region*). Yang dimaksud dengan **Nilai Tambah** yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

**PDRB adhk (atas dasar harga konstan)** adalah cerminan kuantum produksi pada tahun yang berjalan yang dinilai atas dasar harga pada tahun dasar. Dari segi metode statistik, suatu nilai atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan beberapa cara, sedangkan pemakaiannya sangat tergantung dari data yang tersedia di masing-masing sektor/sub sektornya.

### **PENDAPATAN PERKAPITA (*INCOME PER CAPITA*)**

Bila pendapatan-pendapatan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut, maka akan diperoleh suatu pendapatan perkapita,

### **PERTUMBUHAN EKONOMI**

Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian ekonomi makro adalah pertumbuhan PDB secara riil, yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi dimana produk domestik regional bruto mengalami peningkatan (Winardi, 2010). Pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional diukur dengan kenaikan PDB, sedangkan untuk tingkat daerah diukur dengan peningkatan PDRB. Pada dasarnya kedua hal tersebut tidak berbeda, hanya saja skala perhitungan yang mencakup daerah atau nasional.

## 2.2. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a). Terpenuhinya kebutuhan pangan, (b). kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c). rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindakan kekerasan, (d). hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

### 2.2.1. Jenis-jenis Kemiskinan

#### a. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 40 persen dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "sepanjang masih ada kehidupan, orang miskin akan selalu hadir bersama kita".

Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh *Ravallion* (1998 : 26). Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (*official figure*) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan tetapi dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai



untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar daerah dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

#### **b. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum dari kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut adalah “tetap/tidak berubah” dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). *Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain hanya dan jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut.* Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu : a) US \$ 1 per hari, dengan batasan ini diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 per hari yang diperkirakan lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

### c. Terminologi Kemiskinan

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil. Tatanan yang tidak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya. Hal tersebut menyebabkan mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, Suku Tengger di Pegunungan Tengger Provinsi Jawa Timur, dan sebagainya.

Sedangkan kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogyanya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya Suku Badui di Cibeo Banten Selatan, Suku Dayak di pedalaman Pulau Kalimantan, dan suku Kubu di Provinsi Jambi.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakatnya itu dalam kenyataan akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh

determinan-determinan sosial-budayanya (seperti misalnya posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang dicapai dan dapat didayagunakan olehnya itu akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu “sudah takdir”, dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai suratan nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya “Gerakan Membudayakan Keberdayaan” pada lapisan masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.

### **2.2.2. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran**

Strategi kebutuhan dasar (*basic needs*), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981: 29), dipromosikan dan dipopulerkan oleh *International Labor Organisation* (ILO) pada tahun 1976 dengan judul “Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah bagi Satu Dunia”. Strategi kebutuhan dasar memang memberi tekanan pada pendekatan langsung dan bukan cara tidak langsung seperti melalui efek menetes ke bawah (*trickle-down effect*) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Demikian pula kesulitan penentuan secara kuantitatif dari masing-masing komponen kebutuhan dasar karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, seperti misalnya selera konsumen terhadap suatu jenis makanan atau komoditi lainnya.

Beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan. Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli adalah :

1. Menurut *United Nations* (1961), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.
2. Menurut UNSRID (1966), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.
3. Menurut Ganguli dan Gupta (1976), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.
4. Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981:31), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) *personal consumption items* yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) *basic public services* yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.
5. Menurut Hendra Esmara (1986: 320-321), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
6. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

### **2.3. Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berdampak pada penurunan kemiskinan karena berbagai alasan. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditopang oleh sektor-sektor yang memiliki elastisitas lapangan kerja rendah, tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi seperti ini umumnya lebih memberikan keberpihakan kepada pengembangan sektor-sektor tertentu sehingga mempersempit peluang berkembangnya sektor lain, yang pada

akhirnya akan berakibat pada berkurangnya jenis lapangan kerja yang tersedia. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun ditopang oleh keberadaan industri milik negara yang memperoleh sejumlah proteksi tertentu juga tidak menjamin akan dapat menyelesaikan kemiskinan. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang oleh industri canggih juga berpotensi untuk memperparah masalah kemiskinan dan pengangguran jika struktur tenaga kerja yang ada didominasi oleh tenaga kerja berkemampuan rendah (*low skill labor*). *Keempat*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditunjang oleh kekuatan ekonomi yang bersifat terkonsentrasi juga tidak akan sanggup mengatasi masalah kemiskinan (Rajasa, 2007).

Menurut Bappenas (2004), kemiskinan dan ketimpangan merupakan konsep yang berbeda, tetapi keduanya seringkali digunakan bersamaan dalam analisis kemiskinan karena adanya keterkaitan yang erat antara keduanya. Kemiskinan mengacu pada kondisi keterbelakangan dalam berbagai bentuk (pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kapabilitas), sedangkan ketimpangan mengacu pada distribusinya di antara anggota suatu kelompok masyarakat dan daerah. Dalam banyak kasus kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi baik oleh struktural maupun natural. Karena itu, indikator kemiskinan dan ketimpangan seringkali digabungkan dalam analisis dan penilaian kemiskinan.



### BAB III METODOLOGI

#### 3.1. Metode Penghitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi

##### 1. Pertumbuhan ekonomi, baik regional maupun sektoral

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung laju pertumbuhan (*Rate of growth*) dapat dipakai formula sebagai berikut :

$$G = \left[ \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 \right] \times 100$$

dimana :            G        : Laju pertumbuhan  
                      P<sub>t</sub>        : PDRB adhk tahun ke-t  
                      P<sub>t-1</sub>     : PDRB adhk sebelum tahun ke-t

##### 2. Indikasi tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah

Tinggi rendahnya tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah dari besar kecilnya angka pendapatan per kapita, yang diukur dari pendekatan pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, formulasinya sebagai berikut :

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

Dengan laju pertumbuhan per kapita yang positif dan tingkat pendapatan yang meningkat dan mantap, maka hal tersebut menjadi indikasi kemakmuran masyarakat juga semakin meningkat.

### 3.2. Metode Penghitungan Kemiskinan

Dengan memperhatikan konsep dan definisi kemiskinan yang sangat luas, upaya untuk mengukur kemiskinan menjadi tidak mudah. Secara garis besar pengukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif biasanya menggunakan data pendapatan atau pengeluaran rata-rata perkapita, tergantung ketersediaan datanya. Pendekatan kualitatif dapat menggunakan indikator individu (angka kematian bayi, partisipasi sekolah, harapan hidup, dan sebagainya) atau indikator rumah tangga (kondisi rumah, proporsi pengeluaran makanan rumah tangga). Pengukuran kemiskinan yang paling banyak digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada data pendapatan/pengeluaran perkapita dan datanya diperoleh dari survei rumah tangga. Hasil pengukuran ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan kemiskinan seperti berapa jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu wilayah, bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu, bagaimana tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

BPS melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang di sajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret. Serta mulai tahun 2011 pengumpulan data Susenas dilakukan triwulanan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, *penduduk miskin* adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan (GK) merupakan



penjumlahan dari komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) sebagai berikut :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk setiap provinsi, daerah perkotaan dan pedesaan.

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 % penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara adalah Garis Kemiskinan periode lalu di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Penyertaan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke 52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

dengan :

$GKM_{jp}$  = Garis kemiskinan makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p.

$P_{jkp}$  = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

$Q_{jkp}$  = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

$V_{jkp}$  = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

**J** = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

**P** = Provinsi ke-p.

Selanjutnya GKM<sub>j</sub> tersebut disertakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga *implicit* rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

dengan :

$K_{jkp}$  = Kalori dari komoditi k daerah j provinsi p.

$\overline{HK}_{jp}$  = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

dengan :

$GKM_{jp}$  = Kebutuhan makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari atau garis kemiskinan makanan (GKM)

J = Daerah (perkotaan/perdesaan)

P = Provinsi p

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di pedesaan garis kemiskinan (GKMN) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data susenas, modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil survei paket komoditi kebutuhan dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per-komoditi non-makanan yang lebih rinci

dibandingkan data susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} \cdot V_{kjp}$$

dengan :

$GKNM_{jp}$  = Pengeluaran minum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

$V_{kjp}$  = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah dan provinsi p (dari susenas modul konsumsi).

$r_{kj}$  = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).

K = Jenis komoditi makanan terpilih.

J = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

P = Povinsi (perkotaan atau perdesaan)

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan :

$$\% PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

dengan :

$\% PM_p$  = % Penduduk miskin di provinsi p.

$PM_p$  = Jumlah penduduk miskin di provinsi p.

$P_p$  = Jumlah penduduk di provinsi p.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level Nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin Provinsi atau :

$$PM_I = \sum_{p=1}^n PM_p$$

Dengan :

$PM_I$  = Penduduk miskin Indonesia.

$PM_p$  = Penduduk miskin provinsi p.

n = Jumlah provinsi.

Persentase penduduk miskin nasional adalah:

$$\% PM_I = \frac{PM_I}{P_I}$$

dengan :

$\% PM_I$  = Persentase penduduk miskin (secara nasional).

$PM_I$  = Jumlah penduduk miskin (secara nasional).

$P_I$  = Jumlah penduduk Indonesia.

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang dapat digunakan :

- Head count index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).
- Indeks kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty severity Index-P2*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Foster-Greer-Tyhorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

dengan :

$\alpha = 0, 1, 2$

$z =$  Garis kemiskinan.

$y_i =$  Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i=1,2,\dots,q$ ),  $y_i < z$

$q =$  Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n =$  Jumlah penduduk

Jika  $\alpha=0$ , diperoleh *Head count Index* (P0), jika  $\alpha=1$  diperoleh indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan jika  $\alpha=2$  disebut indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*).

Berdasarkan garis kemiskinan tingkat provinsi di atas, maka angka tersebut digunakan sebagai patokan sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota. Penduduk yang berada dibawah kelas batas (kelas dimana garis kemiskinan GK berada) baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dihitung rata-rata pengeluaran perkapitanya yaitu:

$\bar{Y}_{px} =$  Pengeluaran perkapita untuk Provinsi, dan

$\bar{Y}_{kx} =$  Pengeluaran perkapita untuk Kabupaten/Kota.

Perbandingan keduanya dipakai sebagai pendekatan perbedaan harga barang konsumsi antar daerah yang dibayar penduduk dibawah percentil ke X, dengan asumsi bahwa paket (bundel) barang dan kualitas serta kuantitas antara provinsi dan kabupaten sama.

Rasio perbandingan harga antara provinsi dan kabupaten diperkirakan sebagai berikut :

$$R_{kx} = \frac{\bar{Y}_{kx}}{\bar{Y}_{px}}$$

$R_{kx}$  akan sama dengan 1 (satu) apabila tingkat harga yang dibayar penduduk miskin di provinsi sama dengan tingkat harga di kabupaten. Bila rasio tersebut tidak sama dengan satu, berarti ada perbedaan tingkat harga yang dibayar penduduk miskin di kedua daerah tersebut. Selanjutnya garis kemiskinan di kabupaten dihitung menggunakan formula :

$$GK_{ko} = R_{kx} \cdot GK_{po}$$

dimana :

$GK_{ko}$  = Garis kemiskinan kabupaten k

$R_{kx}$  = Rasio rata-rata pengeluaran penduduk perkapita dibawah percentil ke x di  
Kabupaten k

$GK_{po}$  = Garis kemiskinan provinsi p dibawah percentil ke x

## **BAB IV**

### **PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN REMBANG**

Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemeratakan distribusi pendapatan, memperluas kesempatan kerja, mendorong kemakmuran dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan, maka diperlukan adanya alat yang dapat membantu memberikan gambaran tingkat keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi tersebut. Salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah tersedianya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan adanya data tersebut dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah dan juga tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu data PDRB dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan, analisa, dan evaluasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan untuk menentukan sasaran pembangunan.

#### **4.1. Struktur Perekonomian Kabupaten Rembang**

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, struktur perekonomian Kabupaten Rembang masih didominasi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal demikian menggambarkan keadaan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Rembang mendapatkan penghasilan atau bekerja di sektor tersebut. Namun dengan perkembangan yang terjadi saat ini, peranannya mulai mengalami penurunan seiring dengan semakin meningkatnya lapangan usaha yang lain, seperti lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya, terutama dalam tiga

tahun terakhir (**Tabel 4.1**). Industri Pengolahan juga menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2017.

**Tabel 4.1. Distribusi PDRB Seri 2010 Adh Berlaku Menurut Lapangan Lapangan Usaha Kabupaten Rembang, 2013-2017 (persen)**

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,39	30,23	29,99	28,89	27,86
B	Pertambangan dan Penggalian	2,87	3,06	3,12	3,14	4,03
C	Industri Pengolahan	18,83	20,82	21,15	21,70	21,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	6,76	7,45	7,41	7,50	7,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,44	13,01	12,77	12,86	12,90
H	Transportasi dan Pergudangan	3,34	3,51	3,59	3,54	3,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,88	3,04	3,08	3,06	3,03
J	Informasi dan Komunikasi	1,04	1,04	1,02	1,04	1,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,20	4,24	4,22	4,31	4,29
L	Real Estate	0,89	0,89	0,90	0,90	0,89
M,N	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,03	3,89	3,85	3,82	3,72
P	Jasa Pendidikan	5,08	5,44	5,47	5,67	5,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	1,16	1,22	1,26	1,28
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,78	1,86	1,84	1,94	1,95
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017



## 4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang

Tabel 4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, 2013-2017 (persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,22	-5,62	4,16	1,63	3,87
B	Pertambangan dan Penggalian	5,58	6,51	4,03	6,30	20,84
C	Industri Pengolahan	9,88	15,20	7,66	7,86	6,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,21	5,30	2,59	6,77	7,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,19	1,98	1,71	2,98	3,71
F	Konstruksi	-4,40	14,65	6,18	7,46	7,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,14	4,05	4,11	5,28	6,56
H	Transportasi dan Pergudangan	10,54	10,55	6,78	5,44	6,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,47	11,18	6,13	5,63	6,10
J	Informasi dan Komunikasi	10,09	17,16	7,27	7,81	8,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,63	6,22	4,46	6,77	4,21
L	Real Estat	4,70	6,38	6,18	5,78	5,05
M,N	Jasa Perusahaan	16,68	7,15	8,84	9,92	8,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,99	0,67	4,87	2,78	3,81
P	Jasa Pendidikan	15,97	14,86	6,81	7,51	7,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,42	14,97	9,75	9,83	8,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,86	9,38	4,07	8,30	8,36
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>5,43</b>	<b>5,15</b>	<b>5,50</b>	<b>5,22</b>	<b>6,19</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017

Pertumbuhan ekonomi secara agregat ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Selama periode tahun 2013-2017 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang sebesar 5,43 persen dan mengalami perlambatan pada tahun 2014 menjadi 5,15 persen, terendah selama periode tahun 2013-2017. Pada tahun 2015 kembali mengalami percepatan menjadi 5,50 persen dan melambat lagi

pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,22 persen. Namun, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 6,19 persen, tertinggi selama lima tahun terakhir.

Percepatan perekonomian Kabupaten Rembang pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 disebabkan dengan kembalinya lapangan usaha pertanian mengalami percepatan, dari 1,63 persen menjadi 3,87 persen. Dengan porsi yang besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rembang (27,86 persen), meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian cukup berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang secara keseluruhan. Selain itu, didukung dengan percepatan pertumbuhan dari lapangan usaha lainnya, termasuk lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mengalami percepatan sangat signifikan, dari 6,30 persen menjadi 20,84 persen.

#### 4.3. PDRB per Kapita Kabupaten Rembang

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor perekonomian di suatu daerah, yang dihitung dari PDRB *adh berlaku* dan konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita dapat menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah, meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataannya.

**Tabel 4.3. PDRB Per Kapita *adh Berlaku* dan Konstan Kabupaten Rembang, 2013-2017**

Tahun	PDRB Per Kapita (Ribu Rp)	
	<i>Adh Berlaku</i>	<i>Adh Konstan</i>
(1)	(2)	(3)
2013	18.789,70	16.062,90
2014	20.879,31	16.746,18
2015	22.448,60	17.522,70
2016	23.819,76	18.293,18
2017	25.781,14	19.276,85

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017

Dari **Tabel 4.3** terlihat PDRB per kapita Kabupaten Rembang mengalami kenaikan tiap tahunnya selama kurun waktu 2013-2017. PDRB menurut harga berlaku tahun 2013 sekitar 18,79 juta rupiah dan terus meningkat hingga menjadi 25,78 juta rupiah pada tahun 2017. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2017 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Rembang mencapai 25,78 juta rupiah. Sedangkan menurut harga konstan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Rembang meningkat dari 16,06 juta rupiah menjadi 19,28 juta rupiah.

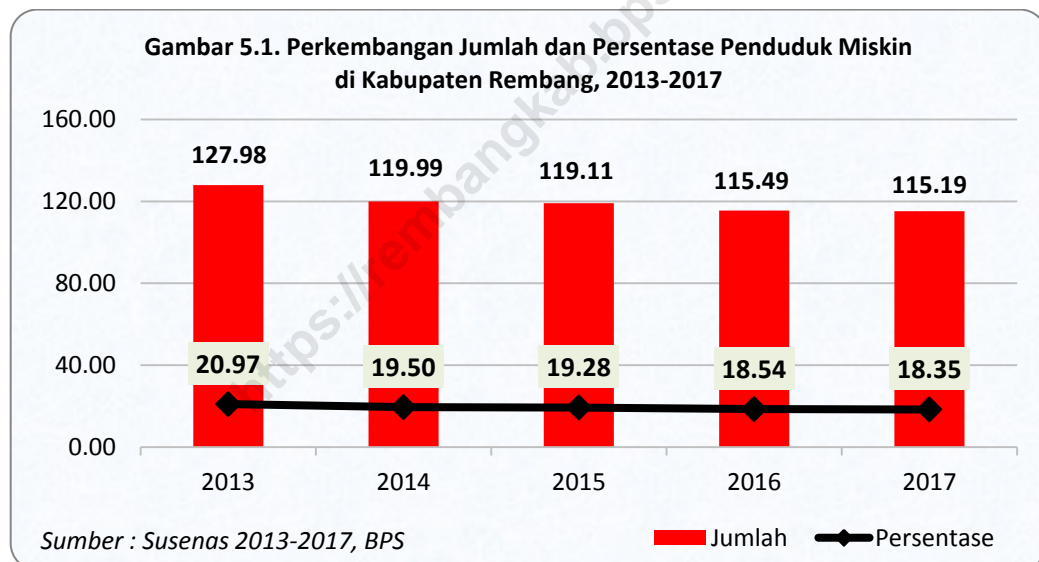
Meskipun perkembangan PDRB per kapita selalu mengalami kenaikan, yang berarti ada peningkatan pendapatan, namun belum dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran penduduk Kabupaten Rembang yang sebenarnya. Hal tersebut karena ada kepemilikan faktor produksi yang tidak hanya dimiliki oleh warga Rembang saja, tetapi sebagian juga dimiliki oleh penduduk di luar Kabupaten Rembang. Oleh karena itu PDRB per kapita Kabupaten Rembang belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Rembang.



## BAB V KEMISKINAN DI KABUPATEN REMBANG

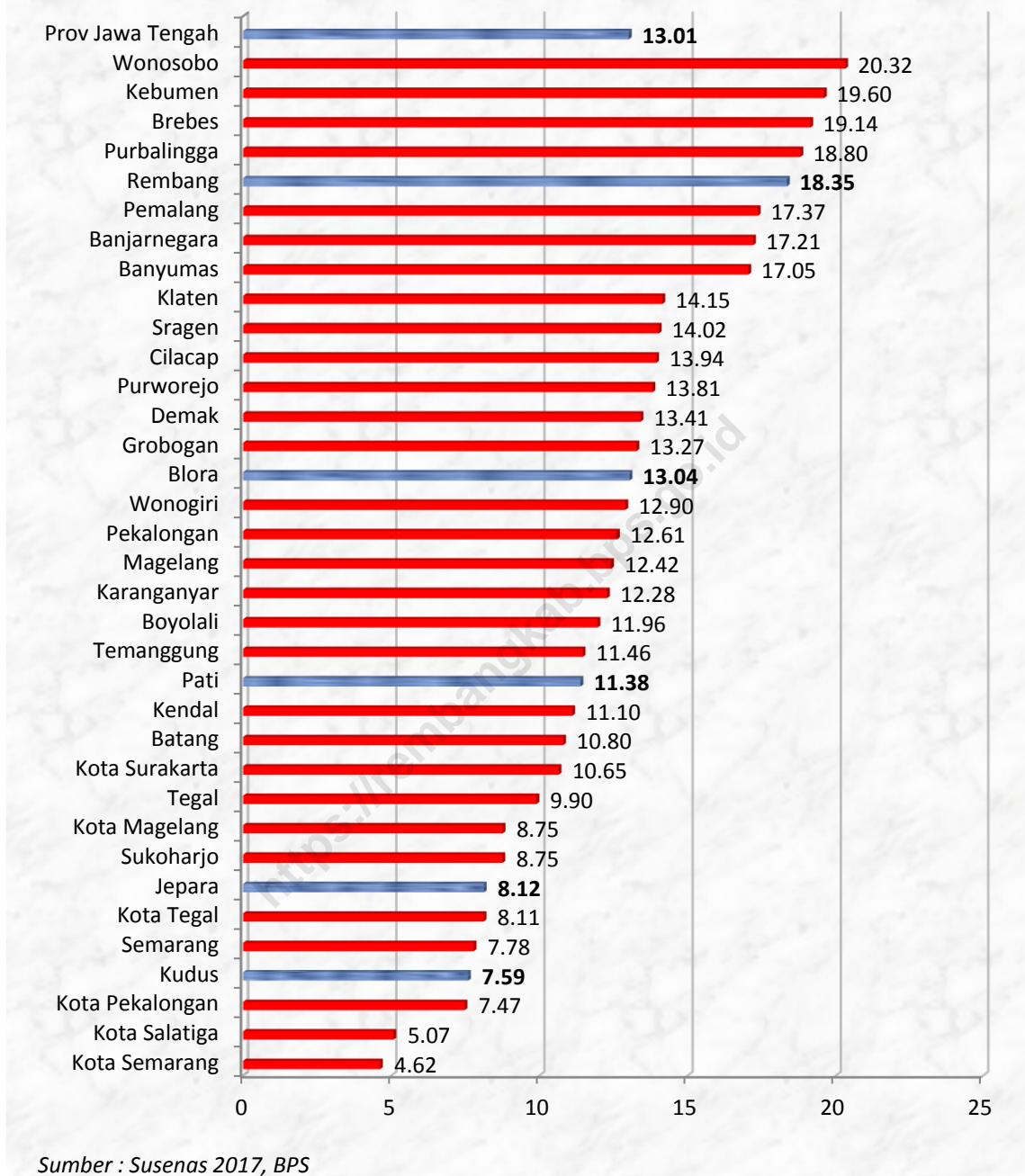
### 5.1. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang pada periode tahun 2013-2017 terlihat mempunyai kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada **Gambar 5.1** terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2013 sebanyak 127,98 ribu jiwa. Setelah itu jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan hingga menjadi 115,19 ribu jiwa pada tahun 2017. Kondisi tersebut cukup menggembirakan, meskipun berkurangnya penduduk miskin hanya sekitar 300 orang selama dua tahun terakhir.



Perubahan jumlah penduduk miskin pada periode tahun 2013-2017 berpengaruh juga terhadap persentase penduduk miskin. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di Kabupaten Rembang tercatat sebesar 20,97 persen. Setelah itu antara tahun 2013-2017 terus mengalami penurunan hingga menjadi 18,35 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Rembang. Bila dilihat perkembangannya, persentase penduduk miskin atau angka kemiskinan Kabupaten Rembang turun kurang satu persen setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2014 yang mengalami penurunan 1,47 persen dibandingkan tahun 2013.

**Gambar 5.2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, 2017**



Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Propinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang (18,35 persen) pada tahun 2017 berada di peringkat 5 (lima) tertinggi dari 35 kabupaten/kota, setelah Kabupaten Wonosobo (20,32 persen), Kabupaten Kebumen (19,60 persen), Kabupaten Brebes (19,17 persen) dan Kabupaten Purbalingga (18,80 persen). Posisi lima kabupaten tersebut tidak

berubah sejak tahun 2015. Sedangkan kabupaten/kota yang terendah persentase penduduk miskinnya adalah Kota Semarang (4,62 persen), kemudian diikuti Kota Salatiga (5,04 persen) dan Kabupaten Pekalongan (7,47 persen). Kabupaten Kudus (7,59 persen) yang sebelumnya peringkat ketiga tergeser oleh Kota Pekalongan menjadi peringkat keempat terendah.

Untuk Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 13,01 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang besarnya 13,27 persen. Terlihat juga pada **Gambar 5.2** bahwa dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdapat 15 kabupaten/kota yang persentase penduduk miskinnya lebih tinggi dari angka Provinsi, sama seperti tahun sebelumnya.

Di wilayah eks-Karesidenan Pati, Kabupaten Rembang (18,35 persen) memiliki persentase penduduk miskin tertinggi dibanding kabupaten lainnya. Sedangkan persentase penduduk miskin terendah tercatat di Kabupaten Kudus (7,59 persen), diikuti Kabupaten Jepara sebesar 8,12 persen. Sementara itu persentase penduduk miskin Kabupaten Pati dan Blora berkisar antara 11-14 persen.

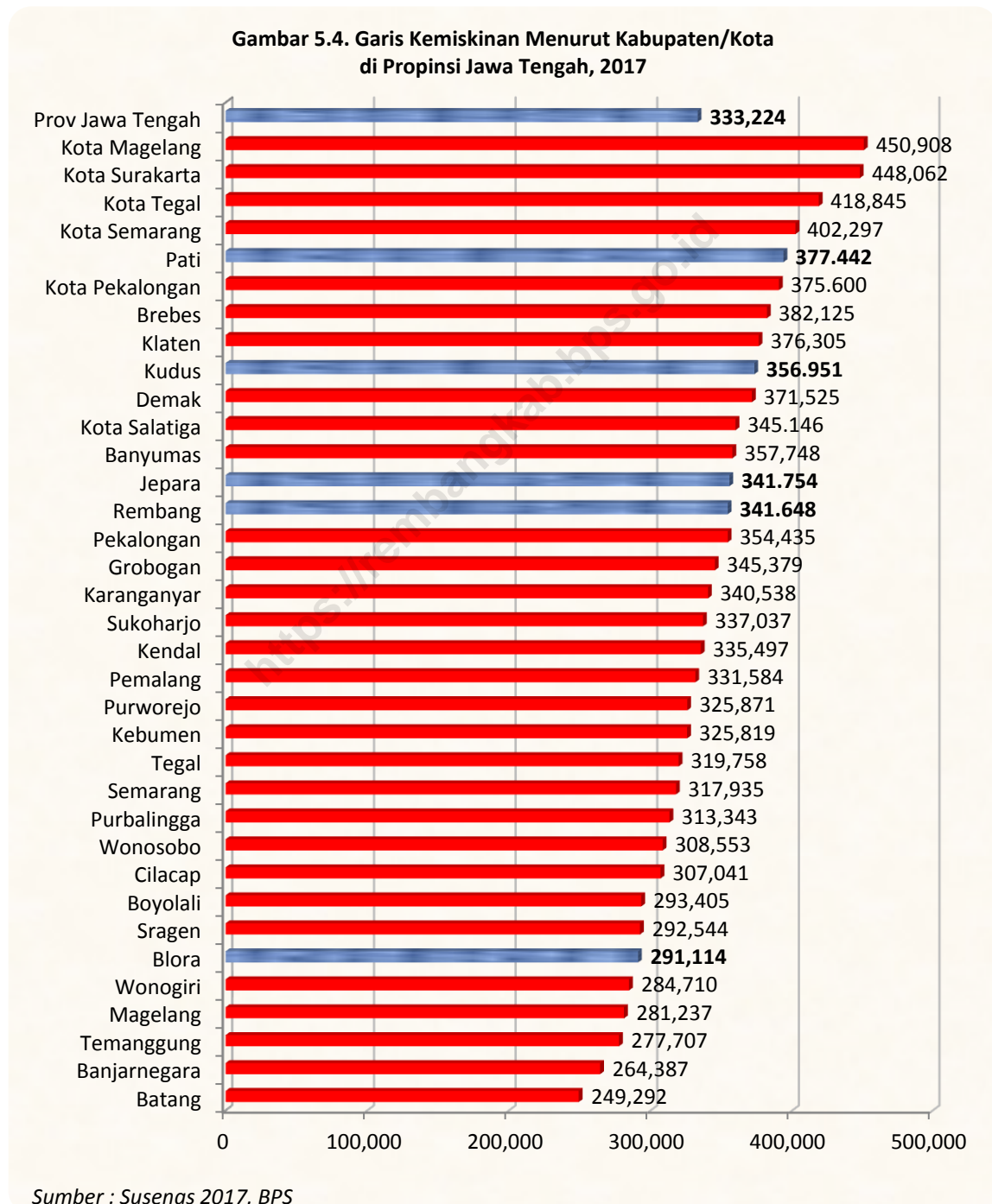
## 5.2. Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang

Garis kemiskinan adalah batasan untuk mengetahui miskin atau tidaknya seseorang. Seseorang yang mempunyai pendapatan yang lebih kecil dari garis kemiskinan, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang miskin dan sebaliknya.

Perkembangan garis kemiskinan pada periode tahun 2013-2017 terlihat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2013-2017 garis kemiskinan Kabupaten Rembang mengalami kenaikan sebesar 70.280 rupiah/kapita/bulan, yaitu dari 284.160 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2013 menjadi 354.440 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2017.



Garis kemiskinan tidak selalu tetap pada setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena memang trend kebutuhan hidup manusia akan berubah setiap saat. Mencermati dari **Gambar 5.3**, juga bisa diartikan bahwa besarnya konsumsi per kapita per bulan penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2013 maksimal sebesar 284.160 rupiah dan pada tahun 2017 mengalami perubahan menjadi 354.440 rupiah.





Pada tahun 2017, garis kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah terdapat di Kota Magelang yaitu sebesar 450.908 rupiah/kapita/bulan, diikuti oleh Kota Surakarta (448.062 rupiah/kapita/bulan) dan Kota Tegal (418.845 rupiah/kapita/bulan). Sedangkan Kabupaten Rembang sendiri menempati peringkat ke-14, naik satu peringkat dibandingkan tahun 2016. Sementara itu garis kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Batang sebesar 249.292 rupiah/kapita/bulan. Untuk Provinsi Jawa Tengah, garis kemiskinannya sebesar 333.224 rupiah/kapita/bulan (**Gambar 5.4**).

Di wilayah Eks-Karesidenan Pati, garis kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Pati, yaitu sebesar 393.817 rupiah/kapita/bulan, diikuti Kabupaten Kudus sebesar 373.224 rupiah/kapita/bulan. Selanjutnya berturut-turut Kabupaten Jepara, Rembang, dan yang terendah adalah Kabupaten Blora. Bahkan hanya Kabupaten Blora yang memiliki garis kemiskinan di bawah 300.000 rupiah/kapita/bulan di wilayah Eks-Karesidenan Pati, yaitu sebesar 291.114 rupiah/kapita/bulan

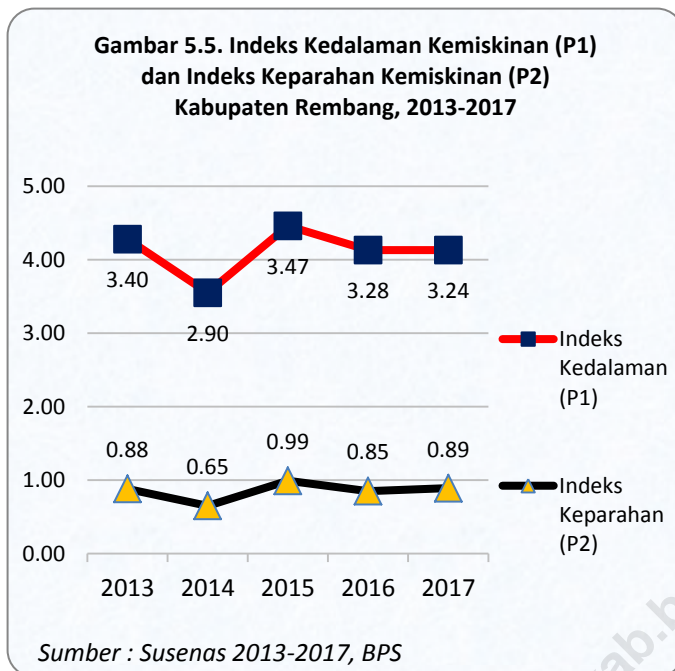
### **5.3. Ukuran Indeks Kemiskinan di Kabupaten Rembang**

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tingkat kedalaman kemiskinan diukur dari indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap/P1*), sedangkan tingkat keparahan kemiskinan diukur dari indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity/P2*). Ukuran P1 menunjukkan adanya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang ditetapkan. Semakin tinggi nilainya, maka penduduk miskin ini semakin menjauhi garis kemiskinan tersebut. Sedangkan ukuran P2 menunjukkan adanya penyebaran pengeluaran dari penduduk. Semakin tinggi nilai dari indeks ini, maka diantara penduduk miskin terjadi kesenjangan yang semakin melebar.

Selama periode tahun 2013-2016 perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami fluktuatif. Pada tahun genap P1 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun ganjil selalu mengalami kenaikan dari tahun

sebelumnya, kecuali pada tahun 2017 Setelah mengalami penurunan pada tahun 2014, P1 kembali naik pada tahun 2015 menjadi 3,47, paling tinggi selama lima tahun terakhir,



yang menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin menjauhi garis kemiskinan. Hal tersebut berarti tingkat perekonomian penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014. Namun, pada tahun 2016 P1 kembali mengalami penurunan menjadi 3,28 dan turun lagi menjadi 3,24 pada tahun 2017. Kondisi demikian

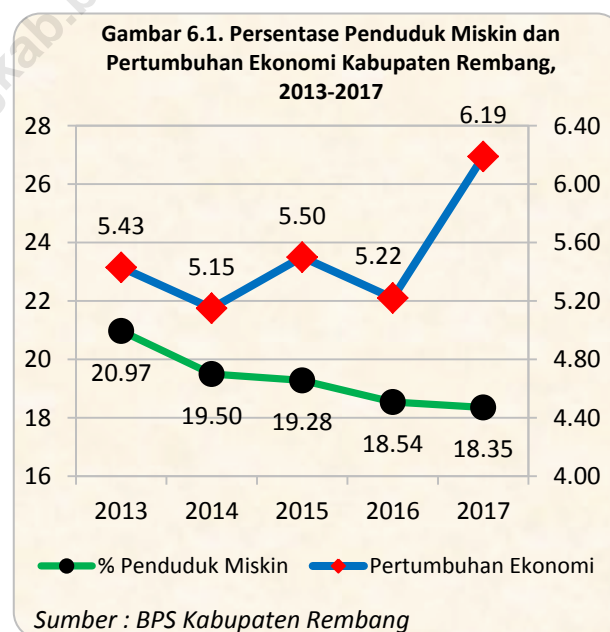
mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2016-2017 cenderung makin mendekati garis kemiskinan, yang berarti terjadi perbaikan pada perekonomian penduduk miskin selama dua tahun terakhir.

Kondisi yang agak berbeda terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang terus mengalami perkembangan yang fluktuatif pada periode tahun 2013-2017. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2014, P2 kembali naik menjadi 0,99 pada tahun 2015, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Rembang semakin melebar. P2 tahun 2015 merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Seperti P1, pada tahun 2016 P2 mengalami penurunan menjadi 0,85. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2016 semakin menyempit dibandingkan tahun sebelumnya. Berbeda dengan P1 yang mengalami penurunan, P2 tahun 2017 naik lagi menjadi 0,89.

## BAB VI KETERKAITAN ANTARA KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat penting untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, walaupun tidak dapat berdiri sendiri untuk mengentaskan kemiskinan. Pada **Gambar 6.1** terlihat bahwa pada saat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang antara tahun 2014-2015 mengalami percepatan dari 5,15 persen menjadi 5,50 persen, angka kemiskinannya menurun dari 19,50 persen menjadi 19,28 persen. Hal yang sama terjadi ketika pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan dari 5,22 persen menjadi 6,19 persen antara tahun 2016-2017, kemiskinan menurun dari 18,54 persen menjadi 18,35 persen.

Namun, ketika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang mengalami perlambatan dari 5,43 persen pada tahun 2013 menjadi 5,15 persen pada tahun 2014, persentase penduduk miskin masih melanjutkan tren penurunannya dari 20,97 persen menjadi 19,50 persen. Demikian juga ketika pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,50 persen menjadi 5,22 persen antara tahun 2015-2016, kemiskinan masih tetap turun dari 19,28 persen menjadi 18,54 persen.

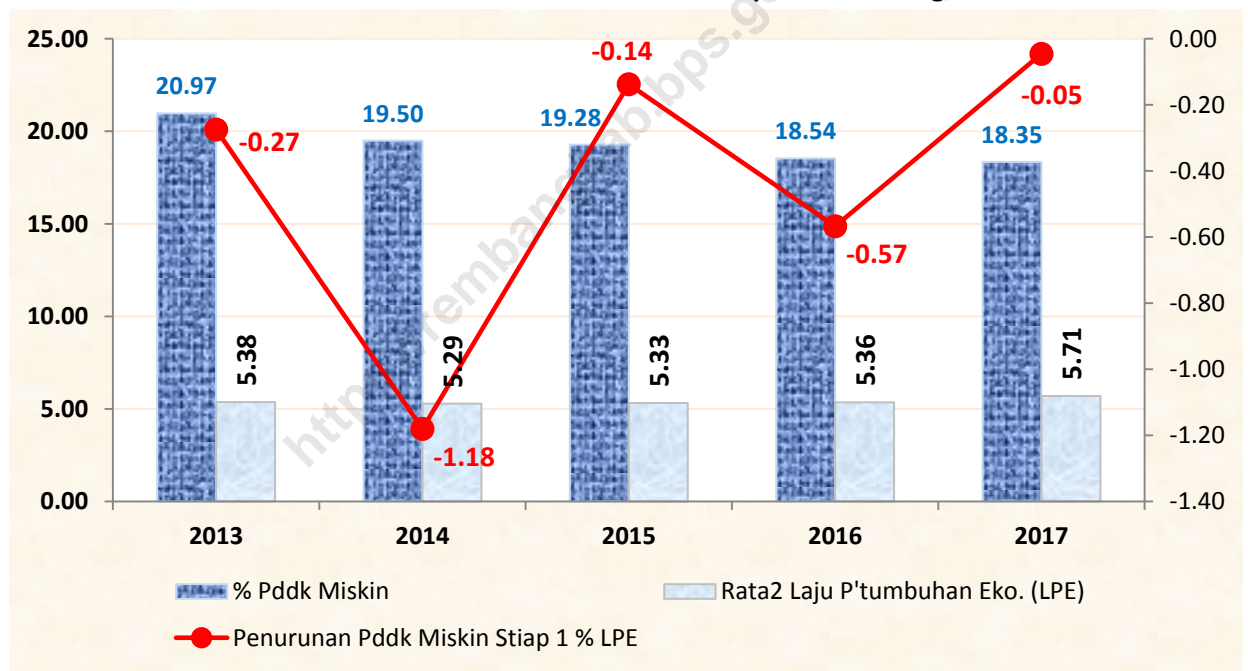


Bila dilihat secara keseluruhan, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 persen selama periode tahun 2013-2017 telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 127,98 ribu pada tahun 2013 menjadi 115,19 ribu pada tahun 2017 atau berkurang sebesar 9,99 persen. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui juga bahwa telah terjadi penurunan persentase penduduk miskin sebesar 1,82 poin apabila pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 (satu) persen, yang berarti kemampuan

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang dapat menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 1,82 poin.

Berdasarkan **Gambar 6.2**, pada periode tahun 2013-2017 kemampuan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tertinggi dalam menurunkan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 1,18 poin, meskipun rata-rata pertumbuhan ekonominya paling rendah (5,29 persen). Sebaliknya, pada tahun 2017 rata-rata pertumbuhannya mencapai yang paling tinggi, namun kemampuan pertumbuhan ekonominya justru paling rendah dalam menurunkan persentase penduduk miskin.

**Gambar 6.2. Persentase Penduduk Miskin, Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penurunan Kemiskinan Per 1% LPE di Kabupaten Rembang, 2013-2017**



Sumber : BPS Kabupaten Rembang

## **BAB VII PENUTUP**

Secara umum tingkat perekonomian Kabupaten Rembang selama periode tahun 2013-2017 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, karena pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan pada akhir periode. Di sisi lain, angka kemiskinan terus mengalami penurunan. Selain itu, terdapat beberapa catatan yang dapat dijadikan bahan evaluasi, antara lain :

1. Pada periode tahun 2013-2014 dan tahun 2015-2016 sempat terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi angka kemiskinan tetap menurun.
2. Kemampuan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 merupakan yang terendah dalam menurunkan persentase kemiskinan, sementara rata-rata pertumbuhannya merupakan yang tertinggi selama periode tahun 2013-2017.

Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang perlu ditangani lebih serius oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Perlu disadari, pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang menjadikan distribusi pendapatan lebih merata, mengurangi pengangguran, perbaikan upah buruh dan nilai tukar petani, serta penanggulangan kemiskinan lainnya sebagai prioritas penting dalam pembangunan merupakan hal yang sangat positif. Diperlukan program jangka pendek dan jangka panjang yang cerdas dari semua unsur pemerintahan yang ada untuk kelancaran dan kemudahan dalam membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinannya. Selain itu, penduduk miskin juga perlu diikutsertakan dan diberdayakan dalam berbagai program pengentasan kemiskinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2009. *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2011. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2011*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. Buku 2, *Pedoman Pencacah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans Maret 2017)*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. Buku 4, *Konsep dan Definisi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans Maret 2017)*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. Buku 5, *Tata Cara Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans Maret 2017)*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2018. *PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha 2013-2017*. Rembang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2017. *Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang 2016*. Rembang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang.
- Bappenas, 2004. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Desa*. Jakarta.
- Esmara, Hendra. 1986. *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- , *International Definition and Measurement of Levels of Living : An Interim Guide* (New York : United Nations , 1961).
- Rajasa, Hatta M. 2007. *Upaya Negara Maju Mengantisipasi Kemiskinan* (Pernah disampaikan dalam acara “Forum Dialog Terbatas Centre for Information and Development Studies (CIDES),” di Jakarta, pada 26 Juni 2007).

Ravallion, Martin. 1998. *Poverty Lines in Theory and Practice : Living Standards Measurement Study*, World Bank : Working Paper No. 13.

Suyanto, Bagong. 1995. *Perangkap Kemiskinan : Problem & Strategi Pengentasannya*, Surabaya : Airlangga University Press.

Thee Kian Wie. 1981. *Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan*. Jakarta : Sinar Harapan.

Winardi. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.

<https://rembangkab.bps.go.id>



# LAMPIRAN

<https://rembangkab.bps.go.id>



**Tabel 1. PDRB Seri 2010 adh Berlaku dan Konstan Menurut Lapangan Usaha serta Perkembangannya di Kabupaten Rembang, 2013-2017**

Tahun	PDRB adh Berlaku		PDRB adh Konstan	
	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Jumlah (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	11.441.103,05	5,41	9.780.750,39	5,43
2014	12.821.715,64	5,15	10.284.274,36	5,15
2015*	13.897.816,58	8,39	10.850.269,20	5,50
2016**	14.865.458,21	6,96	11.416.426,38	5,22
2017***	16.213.782,99	9,07	12.123.231,49	6,19

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (Seri 2010)

Keterangan : \* Angka diperbaiki

\*\* Angka sementara

\*\*\* Angka sangat sementara

**Tabel 2. Distribusi PDRB Seri 2010 Adh Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rembang, 2013-2017 (persen)**

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015*	2016**	2017***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,39	30,23	29,99	28,89	27,86
B	Pertambangan dan Penggalian	2,87	3,06	3,12	3,14	4,03
C	Industri Pengolahan	18,83	20,82	21,15	21,70	21,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	6,76	7,45	7,41	7,50	7,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,44	13,01	12,77	12,86	12,90
H	Transportasi dan Pergudangan	3,34	3,51	3,59	3,54	3,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,88	3,04	3,08	3,06	3,03
J	Informasi dan Komunikasi	1,04	1,04	1,02	1,04	1,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,20	4,24	4,22	4,31	4,29
L	Real Estate	0,89	0,89	0,90	0,90	0,89
M,N	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,03	3,89	3,85	3,82	3,72
P	Jasa Pendidikan	5,08	5,44	5,47	5,67	5,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	1,16	1,22	1,26	1,28
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,78	1,86	1,84	1,94	1,95
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (Seri 2010)

Keterangan : \* Angka diperbaiki  
 \*\* Angka sementara  
 \*\*\* Angka sangat sementara

**Tabel 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang, 2013-2017 (persen)**

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015*	2016**	2017***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,22	-5,62	4,16	1,63	3,87
B	Pertambangan dan Penggalian	5,58	6,51	4,03	6,30	20,84
C	Industri Pengolahan	9,88	15,20	7,66	7,86	6,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,21	5,30	2,59	6,77	7,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,19	1,98	1,71	2,98	3,71
F	Konstruksi	-4,40	14,65	6,18	7,46	7,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,14	4,05	4,11	5,28	6,56
H	Transportasi dan Pergudangan	10,54	10,55	6,78	5,44	6,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,47	11,18	6,13	5,63	6,10
J	Informasi dan Komunikasi	10,09	17,16	7,27	7,81	8,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,63	6,22	4,46	6,77	4,21
L	Real Estat	4,70	6,38	6,18	5,78	5,05
M,N	Jasa Perusahaan	16,68	7,15	8,84	9,92	8,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,99	0,67	4,87	2,78	3,81
P	Jasa Pendidikan	15,97	14,86	6,81	7,51	7,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,42	14,97	9,75	9,83	8,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,86	9,38	4,07	8,30	8,36
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5,43</b>	<b>5,15</b>	<b>5,50</b>	<b>5,22</b>	<b>6,19</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (Seri 2010)

Keterangan : \* Angka diperbaiki

\*\* Angka sementara

\*\*\* Angka sangat sementara

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang, 2013-2017**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	127,98	20,97	3,40	0,88	284.160
2014	119,99	19,50	2,90	0,65	299.503
2015	119,11	19,28	3,47	0,99	314.596
2016	115,49	18,54	3,28	0,85	338.986
2017	115,19	18,35	3,24	0,89	354.440

Sumber : Susenas 2013-2017, BPS

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2014**

Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3301	Cilacap	239,75	14,21	2,37	0,61	265.714
3302	Banyumas	283,48	17,45	2,48	0,56	309.106
3303	Purbalingga	176,04	19,75	3,26	0,80	275.022
3304	Banjarnegara	159,48	17,77	2,88	0,73	229.718
3305	Kebumen	242,31	20,50	2,78	0,61	277.280
3306	Purworejo	102,11	14,41	1,85	0,42	284.409
3307	Wonosobo	165,83	21,42	3,91	1,09	267.548
3308	Magelang	160,48	12,98	2,07	0,47	246.292
3309	Boyolali	118,58	12,36	1,62	0,32	255.391
3310	Klaten	168,18	14,56	2,02	0,45	327.231
3311	Sukoharjo	78,85	9,18	0,76	0,14	291.949
3312	Wonogiri	123,85	13,09	1,65	0,34	244.761
3313	Karanganyar	107,29	12,62	2,02	0,48	288.814
3314	Sragen	130,28	14,87	2,04	0,45	255.550
3315	Grobogan	186,53	13,86	2,33	0,59	290.827
3316	Blora	115,98	13,66	2,09	0,50	248.903
3317	Rembang	119,99	19,50	2,90	0,65	299.503
3318	Pati	148,05	12,06	1,54	0,32	332.228
3319	Kudus	65,80	7,99	0,90	0,15	314.211
3320	Jepara	100,48	8,55	1,17	0,23	299.914
3321	Demak	161,95	14,60	1,90	0,40	315.570
3322	Semarang	79,76	8,05	1,20	0,29	275.612
3323	Temanggung	85,53	11,55	1,51	0,30	240.845
3324	Kendal	110,48	11,80	1,76	0,41	289.486
3325	Batang	82,12	11,13	1,43	0,29	216.952
3326	Pekalongan	109,27	12,57	1,79	0,42	306.281
3327	Pemalang	236,98	18,44	2,49	0,53	287.358
3328	Tegal	140,31	9,87	1,33	0,32	271.875
3329	Brebes	355,12	20,00	2,93	0,66	327.452
3371	Kota Magelang	11,02	9,14	0,94	0,20	376.143
3372	Kota Surakarta	55,92	10,95	1,48	0,30	385.467
3373	Kota Salatiga	10,79	5,93	0,87	0,21	320.204
3374	Kota Semarang	84,68	5,04	0,47	0,08	348.824
3375	Kota Pekalongan	23,62	8,02	1,14	0,26	338.398
3376	Kota Tegal	20,94	8,54	1,38	0,38	353.301
<b>3300</b>	<b>JAWA TENGAH</b>	<b>4.561,83</b>	<b>13,58</b>	<b>2,09</b>	<b>0,51</b>	<b>281.570</b>

Sumber : Susenas 2014, BPS

**Tabel 6. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2015**

Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3301	Cilacap	243,47	14,39	2,71	0,76	273.828
3302	Banyumas	285,85	17,52	2,91	0,71	320.585
3303	Purbalingga	176,49	19,70	3,37	0,85	283.366
3304	Banjarnegara	165,36	18,37	3,51	0,93	236.399
3305	Kebumen	241,94	20,44	4,08	1,19	292.177
3306	Purworejo	101,25	14,27	2,43	0,63	294.158
3307	Wonosobo	166,41	21,45	4,74	1,60	275.180
3308	Magelang	162,38	13,07	1,60	0,32	253.866
3309	Boyolali	119,97	12,45	2,01	0,50	263.734
3310	Klaten	172,30	14,89	2,72	0,72	340.484
3311	Sukoharjo	79,94	9,26	1,09	0,25	303.030
3312	Wonogiri	122,98	12,98	2,10	0,50	252.903
3313	Karanganyar	106,43	12,46	1,82	0,40	303.056
3314	Sragen	130,42	14,86	2,69	0,76	263.199
3315	Grobogan	184,49	13,68	2,56	0,65	303.455
3316	Blora	115,05	13,52	2,08	0,54	257.581
3317	Rembang	119,11	19,28	3,47	0,99	314.596
3318	Pati	147,05	11,95	2,02	0,55	347.575
3319	Kudus	64,10	7,73	0,90	0,17	328.404
3320	Jepara	100,61	8,50	1,28	0,28	314.422
3321	Demak	160,89	14,44	2,32	0,60	328.529
3322	Semarang	81,25	8,15	1,33	0,30	286.918
3323	Temanggung	87,45	11,76	1,99	0,47	248.866
3324	Kendal	109,27	11,62	2,17	0,57	301.449
3325	Batang	83,53	11,27	1,80	0,43	224.437
3326	Pekalongan	112,07	12,84	1,98	0,46	317.796
3327	Pemalang	235,53	18,30	3,93	1,24	298.622
3328	Tegal	143,54	10,09	1,50	0,36	282.861
3329	Brebes	352,01	19,79	3,52	0,93	340.538
3371	Kota Magelang	10,92	9,05	1,39	0,31	405.228
3372	Kota Surakarta	55,71	10,89	1,74	0,40	406.840
3373	Kota Salatiga	10,62	5,80	1,07	0,26	337.511
3374	Kota Semarang	84,27	4,97	0,50	0,09	368.477
3375	Kota Pekalongan	24,06	8,09	0,83	0,15	352.717
3376	Kota Tegal	20,31	8,26	1,34	0,35	371.528
<b>3300</b>	<b>JAWA TENGAH</b>	<b>4.577,04</b>	<b>13,58</b>	<b>2,44</b>	<b>0,65</b>	<b>297.851</b>

Sumber : Susenas 2015, BPS



**Tabel 7. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2016**

Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3301	Cilacap	240,24	14,12	2,58	0,70	292.525
3302	Banyumas	283,90	17,23	3,08	0,85	344.514
3303	Purbalingga	171,78	18,98	3,85	1,20	301.862
3304	Banjarnegara	158,20	17,46	3,03	0,80	252.328
3305	Kebumen	235,90	19,86	3,78	1,11	313.881
3306	Purworejo	99,07	13,91	2,67	0,76	313.931
3307	Wonosobo	160,12	20,53	4,02	1,11	297.422
3308	Magelang	158,86	12,67	1,84	0,44	271.800
3309	Boyolali	116,98	12,09	2,56	0,81	283.921
3310	Klaten	168,01	14,46	2,70	0,71	364.240
3311	Sukoharjo	78,91	9,07	1,36	0,29	327.217
3312	Wonogiri	124,83	13,12	1,68	0,38	275.507
3313	Karanganyar	107,66	12,49	2,09	0,51	329.531
3314	Sragen	126,76	14,38	2,92	0,99	283.649
3315	Grobogan	184,14	13,57	1,78	0,38	333.009
3316	Blora	113,94	13,33	2,17	0,54	279.972
3317	Rembang	115,49	18,54	3,28	0,85	338.986
3318	Pati	144,20	11,65	1,99	0,49	377.442
3319	Kudus	64,19	7,65	1,07	0,21	356.951
3320	Jepara	100,32	8,35	0,68	0,10	341.754
3321	Demak	158,84	14,10	2,20	0,56	356.919
3322	Semarang	80,72	7,99	1,57	0,45	307.505
3323	Temanggung	87,09	11,60	1,70	0,39	268.730
3324	Kendal	107,81	11,37	2,13	0,61	323.078
3325	Batang	82,56	11,04	1,65	0,39	240.541
3326	Pekalongan	113,31	12,90	1,94	0,49	341.648
3327	Pemalang	227,08	17,58	3,04	0,80	319.434
3328	Tegal	144,22	10,10	1,03	0,21	308.270
3329	Brebes	347,98	19,47	3,96	1,16	364.059
3371	Kota Magelang	10,64	8,79	1,20	0,23	425.191
3372	Kota Surakarta	55,91	10,88	1,34	0,35	430.293
3373	Kota Salatiga	9,73	5,24	0,60	0,11	345.146
3374	Kota Semarang	83,59	4,85	0,76	0,18	382.160
3375	Kota Pekalongan	23,65	7,92	0,80	0,13	375.600
3376	Kota Tegal	20,26	8,20	1,04	0,21	395.631
<b>3300</b>	<b>JAWA TENGAH</b>	<b>4.506,89</b>	<b>13,27</b>	<b>2,37</b>	<b>0,63</b>	<b>317.348</b>

Sumber : Susenas 2016, BPS

**Tabel 8. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2017**

Kode	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3301	Cilacap	238,32	13,94	1,98	0,42	307.041
3302	Banyumas	283,25	17,05	3,19	0,85	357.748
3303	Purbalingga	171,88	18,80	2,79	0,68	313.343
3304	Banjarnegara	156,83	17,21	3,25	0,84	264.387
3305	Kebumen	233,45	19,60	3,62	0,99	325.819
3306	Purworejo	98,65	13,81	2,25	0,54	325.871
3307	Wonosobo	159,16	20,32	3,85	1,10	308.553
3308	Magelang	157,15	12,42	1,67	0,31	281.237
3309	Boyolali	116,39	11,96	1,96	0,53	293.405
3310	Klaten	164,99	14,15	2,46	0,61	376.305
3311	Sukoharjo	76,69	8,75	0,93	0,17	337.037
3312	Wonogiri	123,04	12,90	1,80	0,43	284.710
3313	Karanganyar	106,78	12,28	1,85	0,43	340.538
3314	Sragen	124,01	14,02	1,93	0,42	292.544
3315	Grobogan	180,95	13,27	2,03	0,56	345.379
3316	Blora	111,88	13,04	1,53	0,31	291.114
3317	Rembang	115,19	18,35	3,24	0,89	354.440
3318	Pati	141,73	11,38	1,44	0,35	393.817
3319	Kudus	64,45	7,59	1,00	0,21	373.224
3320	Jepara	98,98	8,12	0,98	0,22	355.607
3321	Demak	152,62	13,41	2,20	0,59	371.525
3322	Semarang	79,66	7,78	1,10	0,25	317.935
3323	Temanggung	86,77	11,46	1,81	0,43	277.707
3324	Kendal	106,07	11,10	1,69	0,39	335.497
3325	Batang	81,45	10,80	1,51	0,31	249.292
3326	Pekalongan	111,58	12,61	1,73	0,36	354.435
3327	Pemalang	225,00	17,37	3,52	1,00	331.584
3328	Tegal	141,80	9,90	1,27	0,27	319.758
3329	Brebes	343,46	19,14	3,06	0,78	382.125
3371	Kota Magelang	10,63	8,75	1,30	0,32	450.908
3372	Kota Surakarta	54,89	10,65	1,87	0,44	448.062
3373	Kota Salatiga	9,55	5,07	0,85	0,21	359.944
3374	Kota Semarang	80,86	4,62	0,54	0,12	402.297
3375	Kota Pekalongan	22,51	7,47	0,92	0,20	390.555
3376	Kota Tegal	20,11	8,11	1,42	0,38	418.845
<b>3300</b>	<b>JAWA TENGAH</b>	<b>4.450,72</b>	<b>13,01</b>	<b>2,21</b>	<b>0,57</b>	<b>333.224</b>

Sumber : Susenas 2017, BPS



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Pemuda Km. 1 Rembang, 59218

Telp. dan Faks. (0295) 691040

Situs web : <http://rembangkab.bps.go.id>

Email : [bps3317@bps.go.id](mailto:bps3317@bps.go.id)